

Pelembagaan Politik Partai

Ayu Galuh Mangestuti*

Abstrak

Pemilukada yang merupakan manifestasi Demokrasi yang terjadi pasca reformasi yang mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, dimana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Mekanisme yang dijunjung di Indonesia adalah konvensi, yaitu proses pemilihan calon kepala daerah oleh suatu partai politik. Berangkat dari wacana tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konflik internal Partai Demokrat pada masa pemilukada Surabaya Tahun 2010. Dimana konflik yang terjadi begitu beragam, mulai dari mekanisme rekrutmen yang tidak jelas hingga konflik yang terjadi pasca pemilukada. Konflik awal yang terjadi adalah karena masih kuatnya dominasi di tingkat pusat yang menyebabkan partai-partai politik yang ada masih dikelola secara sentralistik, sementara relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah telah terdesentralisasi. Terlihat dari turunnya surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat kepada Arif Affandi pada tanggal 30 Januari 2010, sementara mekanisme rekrutmen yang dijadwalkan sebelumnya di tingkat DPC kota Surabaya baru dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2010. Konflik yang terjadi tidak hanya sebatas itu, namun juga pada saat Pemilukada, dimana Fandi Utomo yang merupakan kader Partai Demokrat justru memilih untuk maju ke Pemilukada dengan didukung oleh Partai lain, hal ini mengakibatkan terpecahnya suara Demokrat. Sedangkan konflik yang terjadi pasca Pemilukada adalah karena konflik yang terjadi sebelum Pemilukada dan pada saat Pemilukada tidak diselesaikan, sehingga menimbulkan konflik baru.

Kata-Kata Kunci: Pelembagaan, partai politik, konflik, pemilukada.

Pendahuluan

Pemilukada merupakan manifestasi demokrasi yang terjadi pasca reformasi. Dimana pada masa orde baru menggunakan sistem sentralisasi sehingga kekuasaan ada di pemerintah pusat, sistem tersebut dinilai terlalu otoriter dan tidak demokratis, karena masing-masing daerah seharusnya diberi kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri di bawah pimpinan putra dan putri daerah yang seharusnya lebih mengerti potensi daerah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan daerah dengan lebih optimal.

Melalui transfer kekuasaan dan otoritas ke daerah, diharapkan bisa membuat daerah memiliki *bargaining position* yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah tidak hanya berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang di rumuskan oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu, daerah memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Pandangan seperti itu didasari oleh pemikiran bahwa para pemegang kekuasaan di daerah lebih tahu selera

masyarakat di daerah daripada pemegang kekuasaan di pusat. Selain itu, adanya mekanisme akuntabilitas yang lebih langsung dengan masyarakat di harapkan tidak membuat pemegang kekuasaan di daerah itu tidak main-main dengan kekuasaan yang mereka miliki. Kalau tidak, rakyat di daerah bisa menghukumnya, misalnya, melalui cara tidak memilihnya kembali di dalam Pemilu berikutnya.¹

Tabel 1.1. Jadwal Pemilukada Surabaya Tahun 2010

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	3 April 2010	Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon.
2.	3-15 Mei 2010	Pemberitahuan tim kampanye.
3.	16-29 Mei 2010	Masa kampanye.
4.	30 Mei-1 Juni 2010	Masa tenang.
5.	2 Juni 2010	Coblosan
6.	2-5 Juni 2010	Perhitungan dan rekapitulasi suara di PPK hingga
7.	6 -10 Juni 2010	KPU Surabaya. Penyusunan berita acara rekapitulasi di tingkat kota serta penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Surabaya.

Sumber: KPU Surabaya

* Alumni Program Sarjana S-1 Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

¹ Marijan, Kacung. Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung, Surabaya: Pustaka Eureka, 2006, h. 14.

Pemilukada yang akan diselenggarakan di Surabaya juga mempunyai banyak agenda yang harus dilakukan pada saat sebelum dan sesudah Pemilukada berlangsung. Adapun jadwal Pilwali yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Selanjutnya, peran partai politik bisa dikatakan merupakan ujung tombak bagi terselenggaranya pemilu di daerah yang lebih dikenal dengan pilkada atau pemilukada, karena sesuai dengan Undang-undang, peserta pemilukada adalah partai politik dan independent. Namun, Salah satu mekanisme yang dijunjung partai di Indonesia dalam proses demokrasi adalah konvensi. Konvensi sendiri disini adalah proses pemilihan calon Kepala Daerah oleh suatu partai politik. Partai melakukan penyaringan para kandidat terbaik yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Pemenang konvensi akan menjadi calon kepala daerah mewakili partai politik dalam Pilkada.³ Di dalam tubuh organisasi kepartaian, urusan penyaringan kandidat untuk diajukan dalam pemilukada tentu saja bukan perkara yang mudah. Calon yang dipilih harus orang yang mempunyai tingkat elektabilitas paling besar dalam memenangkan pemilukada. Kemudian timbul berbagai pilihan dan dugaan karena opini setiap orang belum tentu sama, sehingga memungkinkan terjadi pro-kontra dalam tubuh partai politik mengenai siapa yang akan diajukan oleh partai politik tertentu dalam ajang pemilukada. Hal inilah yang rawan memicu konflik dalam internal partai menjelang atau pada saat terjadi pemilukada. Demikian juga yang terjadi pada partai demokrat.

Pada mulanya, terdapat tiga orang bacawali (bakal calon walikota) yang dijagokan dari kalangan kader partai demokrat, yaitu Wisnu Wardhana, Arif Affandi dan Fandi Utomo. Wisnu Wardhana adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya, sosok yang telah berhasil mengantarkan Partai Demokrat mencapai kemenangan. Jika sebelumnya Partai Demokrat hanya 5 kursi pada legislatif 2004, di bawah kendalanya, Partai Demokrat Surabaya bisa merubah keadaan menjadi pemenang Pemilu 2009 di Kota Surabaya dengan perolehan 16 Kursi. Atas prestasi itulah Wisnu berhak menjadi Ketua DPRD Kota Surabaya. Sedangkan Arif Affandi juga merupakan kader Demokrat dan telah menjabat sebagai wakil walikota Surabaya pada periode sebelumnya (incumbent), juga menjabat Wakil Ketua Infokom

DPD Partai Demokrat Jatim dan Koordinator Media Center Tim Sukses SBY Jawa Timur, namanya cukup populer di masyarakat karena posisi-posisi tersebut, terutama sebagai wakil walikota Surabaya periode 2005-2010. Sedangkan Fandi Utomo adalah mantan dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Ia mundur dari ITS dan PNS karena alasan menjadi Ketua Tim Sukses SBY Jawa Timur 2004 lalu. Fandi Utomo sebelumnya juga pernah berlaga melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun akhirnya ia terpental dan tidak mendapat restu dari Gus Dur pada ajang Pilkada 2005. Beliau juga merupakan sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan ketua tim sukses SBY Jatim pada saat pilpres, dimana diketahui bahwa SBY berhasil memenangkan suara di daerah Jawa Timur, sehingga Fandi Utomo memperoleh dukungan dari beberapa pihak dalam internal Partai Demokrat karena prestasi tersebut.

DPP Partai Demokrat akhirnya mengeluarkan rekomendasi atas nama Arif Afandi sebagai calon wali kota Surabaya. Surat rekomendasi telah dikirim ke DPC Partai Demokrat Surabaya untuk disosialisasikan.⁴ Persoalan ini menjadi semakin menarik, karena Fandi Utomo yang sebelumnya dijagokan oleh beberapa pihak dari kubu Partai Demokrat yang juga merupakan sekretaris DPD Partai Demokrat pada akhirnya diusung oleh partai lain menjadi cawali. Hal ini mengakibatkan terpecahnya dukungan dari internal partai demokrat, beberapa pihak mengizinkan dan beberapa lagi menentang keras tindakan Fandi Utomo tersebut, karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Polemik yang terjadi menjadi sangat menarik untuk dikaji karena pada akhirnya, Arif Affandi dan Fandi Utomo sama-sama kalah dalam Pemilukada putaran pertama.

Usaha untuk konsolidasi kemudian dilakukan dengan cara Fandi Utomo bersedia memberikan suaranya kepada Arif affandi pada pemilukada ulang, namun hal itu ternyata tidak ditepati oleh Fandi Utomo, sehingga memicu kemarahan dari berbagai pihak di kubu demokrat, beberapa bahkan menghendaki pemecatan Fandi Utomo secara tidak hormat sebagai sekretaris DPD. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kemudian menjelaskan dari evaluasi yang ada, kekalahan Demokrat di 14 daerah di Jawa Timur di sebabkan dua hal yakni, figur yang dicalonkan serta mesin

² Lihat Skripsi Abul Haris Suryo Negoro, Konvensi Calon Presiden sebagai Strategi Politik Partai Golkar, Surabaya: Universitas Airlangga, 2005, h. 34

³ Saputrodwi37yahoo.com.blogspot.com

⁴ HANAFI NEWS, blogspot.com/2010/06/dpd.

⁵ Ibid

politik partai.⁵ Seperti diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum⁶

Untuk mencalonkan seorang kepala daerah, figurinya harus jelas dan populer di masyarakat. Mesin politik partai harus benar-benar dijalankan. Tapi kenyataannya, kemarin mesin politik tidak berjalan maksimal. Ini artinya, sosialisasi kurang dilakukan.

Mengenai soal figur yang dicalonkan di Pemilu 2010, Anas menegaskan, DPP tidak terlalu mencampuri. DPP hanya sebatas memberikan rekomendasi saja, sedangkan yang mengusulkan tetap dari daerah masing-masing. Intinya, Anas Urbaningrum berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan dalam internal partai pasca terjadinya kekalahan dalam Pemilu 2010, khususnya pemilu 2010 Surabaya. Pernyataan tersebut seperti membenarkan adanya konflik yang terjadi sehingga dalam internal partai perlu diadakan perbaikan.⁷

Konflik di Partai Demokrat yang begitu nyata terlihat adalah perseteruan antar kader Partai Demokrat dalam ajang Pemilu 2010 walikota Surabaya tahun 2010, dimana Fandi Utomo yang juga merupakan kader partai Demokrat ternyata memilih untuk maju menjadi cawali dengan didukung oleh Partai Politik lain, yaitu PPP, PKS, PDS dan PKNU, karena tidak mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat. Dengan demikian Fandi Utomo bersaing melawan Arif Affandi, kader partai Demokrat yang mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat. Poin tersebut adalah yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti tentang konflik di Partai Demokrat pada masa Pemilu 2010.

Adapun penelitian ini memiliki tiga maksud untuk memetakan apakah terjadi konflik di Partai Demokrat pada masa pemilu 2010 Surabaya tahun 2010, mengetahui bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terjadi di Partai Demokrat pada masa pemilu 2010 Surabaya tahun 2010, dan untuk mengetahui apakah terdapat usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dalam hal ini merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln 1987).⁸ Alasan di gunakannya metode kualitatif

dalam penelitian ini karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti, test, kuesioner dan pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk eksploratif dan klarifikasi mengenai suatu fakta atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Peta Konflik

Keunikan dari pemilu 2010 Surabaya Tahun 2010 ini bagi Partai Demokrat adalah, ketika kadernya diusung oleh partai lain dalam ajang pemilu 2010. Hal ini kemudian memunculkan asumsi bahwa di dalam tubuh internal partai demokrat sedang mengalami konflik sehingga kadernya yang notabene memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi kepartaian demokrat justru memilih untuk berpaling ke partai lain agar dirinya dapat mencalonkan diri sebagai walikota. Fandi Utomo yang menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Demokrat propinsi Jawa Timur, dimana juga telah berhasil memenangkan SBY dalam ajang pilpres di daerah Jawa Timur, ternyata rela berdamai dengan partai lain demi keinginannya untuk menjadi walikota Surabaya. Sementara itu, kubu partai Demokrat sendiri lebih memilih untuk berkoalisi dengan partai Golkar sehingga surat rekomendasi dari DPD Partai Demokrat propinsi Jawa Timur pada akhirnya turun kepada Arif Affandi dan Adies Kadir yang notabene merupakan kader partai Golkar.

Namun, baik kader partai Demokrat yang resmi didukung oleh partai dengan turunnya surat rekomendasi, maupun kader Partai Demokrat yang didukung oleh partai lain pada akhirnya tidak dapat memenangkan Pemilu 2010 Surabaya pada putaran pertama. Konflik yang terjadi sebelum pemilu 2010 diantara oknum tersebut kemudian diupayakan

⁷ Ibid

⁸ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h.5 Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010, h.5

untuk dihilangkan dengan cara mempertemukan Fandi Utomo dan Arif Affandi serta jajaran kepengurusan Partai Demokrat, sehingga pada pemilukada putaran kedua, Fandi Utomo berkomitmen bahwa suara yang dia dapatkan akan diberikan kepada Arif Affandi supaya Arif dapat memenangkan pemilukada putaran kedua. Namun komitmen tersebut ternyata tidak dapat ditepati, entah karena faktor administrasi yang berlangsung alot atau karena faktor pribadi.

Rekrutmen Partai Demokrat dimulai dengan membentuk panitia penjangkaran di tingkat DPC kota Surabaya. Panitia tersebut bertugas untuk menerima nama-nama yang masuk, nama-nama yang ingin menjadi calon walikota dengan dukungan Partai Demokrat. Proses penjangkaran berlangsung terbuka, dimana setiap orang dihargai haknya sebagai warga Negara, yaitu berhak untuk dipilih dan memilih pada pemilu. Dengan demikian bakal calon walikota yang masuk ke panitia penjangkaran tidak hanya berasal dari kader partai demokrat, tetapi juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pergerakan, dan lain-lain. Seperti yang disampaikan oleh wakil ketua tim penjangkaran, H.M.S. Walidji, sebagai berikut.

“Saya selaku wakil ketua tim penjangkaran bertugas untuk menerima nama-nama yang masuk, kemudian menjaring dengan cara mendengar visi dan misi setiap bakal calon walikota tersebut, saat itu memang wacana yang muncul sangat beragam, bahkan Pak Alisjahbana sebelum berangkat melalui jalur independen atau perseorangan juga sempat ke Demokrat dulu, tapi ya karena surat rekomendasi hanya turun kepada satu orang dan orang itu adalah Arif Affandi, jadi kemudian beliau mencoba maju lewat jalur perseorangan.”⁹

Dalam proses penjangkaran memang sudah sangat dinamis, dimana calon-calon yang muncul berasal dari berbagai kalangan. Adapun nama-nama yang muncul adalah Arif Affandi, Wisnu Wardhana, Fandi Utomo, Abimanyu, Alisjahbana dan Sugeng Riadi. Sementara itu, adapun nama-nama yang muncul sebagai calon wakil walikota, yaitu Alim Basa Tauleka, Syamsiah, Lukman Hakim, Eddy Gunawan Santoso dan Sri Hartono. Acara sosialisasi dilaksanakan pada tanggal Februari 2010 di hotel oval, jalan Diponegoro Surabaya. Persyaratan mendaftar adalah harus lulusan S1, selebihnya mereka diberi kesempatan untuk memaparkan visi-misinya di hadapan pengurus ranting, PAC, DPC dan DPD Partai Demokrat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

kandidat walikota yang mereka usung. Masing-masing orang yang mendaftar diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar lima belas juta rupiah.

Walaupun pada saat sosialisasi dilakukan sudah muncul desas-desus bahwa surat rekomendasi akan turun pada Arif Affandi, namun Partai Demokrat tetap menjalankan acara tersebut karena surat rekomendasi belum secara resmi diberikan kepada tim penjangkaran cawali-cawawali. Sehingga agenda dalam menghadapi pemilukada Surabaya Tahun 2010 tetap dilakukan sesuai dengan tahapan dan mekanisme partai yang disepakati sebelumnya. Namun, menilik dari turunnya surat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk menunjuk Arif Affandi sebagai kandidat walikota yang diusung Partai Demokrat pada tanggal 30 Januari 2010, maka acara sosialisasi di hotel oval pada tanggal 6 Februari 2010 tersebut sebenarnya perlu dipertanyakan. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pusat ke daerah.

Kemudian nama-nama yang paling diperhitungkan adalah Arif Affandi dan Fandi Utomo, sedangkan Wisnu Wardhana sendiri yang notabene merupakan Ketua DPC kota Surabaya justru tidak terlalu memperoleh dukungan dengan alasan karena pada saat itu beliau sudah menduduki posisi strategis, yaitu kursi ketua DPRD kota Surabaya.

“Sebenarnya Pak Wisnu tidak perlu memperoleh dukungan bukan karena memang beliau dinilai tidak kompeten, tapi karena beliau lebih diinginkan untuk menempati posisi yang pada waktu itu sudah beliau tempati, yakni ketua DPRD kota Surabaya.”¹⁰

Namun, ketika disinggung tentang masalah tersebut pada kesempatan lain, ketua PAC yang menyatakan hal itu mengatakan bahwa sebenarnya memang sebagian besar PAC dan DPC tidak menyetujui Wisnu Wardhana karena memang dinilai tidak kompeten dan profesional.

Arif Affandi muncul sebagai nama yang sentral karena merupakan *incumbent* sehingga cukup populer di kalangan masyarakat, terbukti dengan hasil *quick count* yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei. Sedangkan nama Fandi Utomo muncul karena beliau adalah sekretaris DPD Partai Demokrat Propinsi Jawa Timur dan merupakan ketua tim pemenang SBY pada pilpres lalu, sehingga karena jasanya tersebut, maka Fandi Utomo dinilai memiliki kompetensi untuk

⁹ Wawancara dengan H.M.S Walidji, ketua dewan pakar DPC, hari Selasa, 14 Desember 2010, pukul 09.00 WIB

¹⁰ Wawancara dengan S, hari Senin, 13 Desember 2010, pukul 10.00

menjadi calon walikota, disamping itu dari wacana yang berkembang, Fandi Utomo memperoleh dukungan dari mayoritas komponen Partai Demokrat tingkat DPC dan PAC.

Dari beberapa nama yang muncul tersebut, kemudian demi mencari figur yang tepat pada pilkada Surabaya dipertengahan tahun 2010 mendatang, Partai Demokrat segera menurunkan tiga lembaga survey. Adapun lembaga survey tersebut diharapkan mampu menemukan calon walikota yang tepat untuk Partai Demokrat.

"Tugas lembaga survey menjaring siapa figur calon wali kota (Cawali) yang bakal diusung partai ini pada pilkada Surabaya pertengahan tahun 2010 mendatang, nantinya tugas tiga lembaga survey yang kredibel akan jalan seiringan dengan dengan kinerja Tim sembilan Parta Demokrat dalam melakukan penjaringan figur calon walikota. Nantinya survei itu dilakukan di setiap kecamatan dan kelurahan/desa di Surabaya. Bahkan sampel yang dijadikan survei nanti sekitar 800 respon yang tersebar merata di tiap kecamatan dan kelurahan,"¹¹

Untuk itu Hadi berharap bahwa keberadaan survei ini nantinya dapat menjadi acuan tingkat akseptabilitas dan kapabilitas seorang calon walikota. Dengan demikian, jelas Hadi bilamana ada kandidat yang tepat dari lembaga survey, tentunya figur tersebut berhak mengantongi tiket dari partai di ajang pilkada Surabaya pertengahan tahun 2010.

Kemudian dari hasil penjaringan tersebut kemudian tiga nama yang muncul di serahkan kepada DPP untuk ditelaah sehingga dapat segera memberi keputusan, siapa yang paling layak memperoleh surat rekomendasi dari Partai Demokrat. Sementara itu hasil *quick count* menunjukkan bahwa tingkat elektabilitas dan popularitas Arif Affandi adalah yang paling tinggi. Seperti yang dapat terlihat dalam table di bawah ini:

Tabel 1: Hasil Survey Popularitas dan Elektabilitas

Nama Bacawali	Popularitas %	Elektabilitas %
Arif Affandi	30	19
Saleh Mukadar	11	9
Adies Kadir	8	4

Sumber : Jawa Pos 26 Februari 2010

Berdasarkan hasil survey, dari segi popularitas, Arif Affandi mendapatkan nilai (30

persen), Saleh Ismail Mukadar (11 persen) dan Adies Kadir (8 persen). Sedangkan untuk elektabilitas, Arif Affandi (19 persen), Saleh Ismail Mukadar (9 persen) dan Adies Kadir (4 persen). Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode random sampling dengan margin error 2,5 persen. Jumlah responden per kecamatan ditentukan secara proposional. Sasaran responden adalah seluruh warga yang memiliki hak pilih dan hendak menggunakan hak pilihnya. Survei dilakukan di semua lapisan masyarakat dan tidak dilakukan di basisnya Golkar. Ini adalah survey resmi Partai Golkar yang dilakukan DPD. Hasilnya pun juga tidak direkayasa sama sekali.¹² Melalui hasil *quick count* tersebut, maka melihat tingkat elektabilitas dan popularitas Arif Affandi yang tinggi, maka surat rekomendasi kemudian diturunkan kepada Arif Affandi.

Bentuk-bentuk Konflik

Penyebab konflik politik pada dasarnya dapat dibagi dua, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Yang dimaksud dengan kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk serta kultural, sedangkan kemajemukan secara vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan.¹³

Ada lima jenis Konflik yang ada dalam kehidupan organisasi, dalam hal ini, organisasi Partai Politik, yaitu:

1. Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya.
2. Konflik antar individu, dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan).
3. Konflik antara individu dalam kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok.

¹¹ Isn.or.id/berita.php?berita_id=13

¹² Jawa Pos, Selasa 26 Februari 2010, Survey Resmi Partai Golkar: Arif pertama, Adies ketiga.

¹³ ibid, h. 78

4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.
5. Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu Negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien.¹⁴

Pelembagaan ialah proses dengan mana organisasi dan tata cara memperoleh nilai baku dan stabil. Tingkat pelembagaan setiap sistem politik dapat ditentukan dari segi kemampuan untuk menyesuaikan diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduan organisasi dan tata cara. Demikian juga tingkat pelembagaan setiap organisasi atau tata cara tertentu dapat diukur dari kemampuannya, kompleksitas, otonomi dan keterpaduannya. Apabila ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi dan kemudian diukur, maka sistem politik dapat juga dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat pelembagaannya. Selain itu terbuka juga kemungkinan untuk mengukur peningkatan dan surutnya pelembagaan organisasi dan tata cara tertentu dalam sistem politik.¹⁵

Penyesuaian diri dan kekakuan. Semakin mudah suatu organisasi atau tata cara dapat menyesuaikan diri, semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya; sebaliknya apabila kurang dapat menyesuaikan diri dan lebih kaku, pelembagaannya akan semakin rendah pula. Kemampuan menyesuaikan diri merupakan ciri khas yang harus dicapai. Semakin banyak tantangan dan semakin tua usia organisasi, maka semakin besar pula kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri. Kekakuan biasanya merupakan cirri khas yang lebih menandai organisasi yang masih muda dibandingkan dengan organisasi yang tua. Kemampuan menyesuaikan diri suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: ¹⁶

1. Perhitungan kronologis. Semakin tua eksistensi suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya. Semakin tua organisasi, akan semakin banyak pula kemungkinan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya pada setiap jangka waktu tertentu berikutnya. Pada dasarnya, proses pembangunan politik berjalan

cukup lambat.¹⁷

2. Usia Generasi. Selama organisasi masih mempunyai tokoh-tokoh angkatan pertama dan selama tata caranya masih dilaksanakan oleh mereka, sampai sebegitu jauh kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri masih perlu diragukan. Semakin sering organisasi mampu mengatasi masalah suksesi menurut cara-cara yang luwes, dan kemudian menggantikan tokoh-tokoh pimpinannya, akan semakin tinggi pula tingkat pelembagaan organisasi itu. Sudah tentu apabila dikaji menurut ukuran yang lebih besar, maka usia generasi merupakan fungsi usia kronologis.¹⁸
3. Segi Fungsi Organisasi. Sudah tentu fungsi organisasi dapat didefinisikan menurut cara-cara yang hampir dapat dikatakan tidak terbatas. Biasanya organisasi dibentuk untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu. Apabila fungsi itu tidak diperlukan lagi, organisasi akan menghadapi krisis, organisasi harus mencari fungsi baru atau menerima nasibnya untuk kemudian mati perlahan-lahan. Organisasi yang berhasil menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dalam lingkungannya, dan juga mengubah satu atau dua fungsinya yang utama, biasanya akan jauh lebih melembaga dibandingkan dengan organisasi yang tidak melakukan itu. Tolok ukur yang tepat untuk mengkaji tingginya tingkat pelembagaan organisasi bukanlah dari sudut sejauh mana organisasi dapat melaksanakan fungsi tertentu, melainkan justru sejauh mana ia dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fungsi.¹⁹

Dengan demikian maka Partai Demokrat kemungkinan besar tingkat pelembagaannya rendah karena Partai Demokrat kurang mampu untuk menyesuaikan diri, terutama pada saat Pemilu 2010, karena Partai Demokrat merupakan Partai dengan usia muda, selain itu tokoh yang paling sentral adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan partai Demokrat sendiri sebenarnya merupakan kendaraan politik yang dibangun Susilo Bambang Yudhoyono agar dapat menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia, orang-orang yang kemudian masuk ke partai Demokrat juga merupakan orang-orang yang percaya dan

¹⁴ Handoko, T. Hani. Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 1999. h. 349.

¹⁵ Huntington, Samuel, P., Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003. h.16.

¹⁶ Ibid. h.16-17

¹⁷ Ibid. h.17.

¹⁸ Ibid. h.18.

¹⁹ Ibid. h.19.

mendukung Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga Partai Demokrat sangat identik dengan keberadaan tokoh tersebut. Selama organisasi masih mempunyai tokoh-tokoh angkatan pertama dan selama tata caranya masih dilaksanakan oleh mereka, sampai sebegitu jauh kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri masih perlu diragukan. Hal inilah yang terjadi di Partai Demokrat saat ini, dimana pada awal berdirinya Partai hingga saat ini masih sangat berpengaruh dengan satu tokoh, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Kesatuan dan Perpecahan. Semakin terpadu dan utuh suatu organisasi semakin tinggi pula tingkat pelembagaannya, dan sebaliknya semakin terpecah organisasi, maka semakin rendah pula tingkat pelembagaannya. Sudah tentu beberapa ukuran konsensus merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok social. Suatu organisasi yang efektif, minimal harus didukung oleh sejumlah kesepakatan mengenai batas-batas fungsi kelompok maupun berbagai tata cara yang dapat diterapkan untuk mengatasi perselisihan yang timbul di dalam batas-batas itu. Konsensus harus mencakup mereka yang aktif di dalam sistem. Sedangkan orang-orang yang tidak berperan serta di dalam sistem, atau hanya yang turut aktif di dalam waktu-waktu tertentu atau setengah-setengah saja, tidak perlu memberikan konsensus. Dan kenyataannya mereka memang sama-sama tidak memiliki konsensus sampai suatu tingkat sebagaimana halnya dengan para partisipan. Pesatnya pertumbuhan anggota atau partisipan dan dalam jumlah yang cukup besar di dalam suatu sistem, cenderung melemahkan persatuan dan kesatuan organisasi.²⁰

Terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi pada tubuh internal Partai Demokrat, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pelembagaan Partai ini cenderung kurang. Konflik yang terjadi pada masa Pemilu 2009 juga kurang disikapi dengan baik oleh komponen partai, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Perpecahan yang terjadi di tingkat daerah tidak mendapat perhatian yang memadai dari kepengurusan tingkat pusat, terlihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada komponen partai tingkat daerah yang secara nyata membangkang dari partai dan menyalahi AD/ART yang merupakan peraturan dasar partai. Tindakan kurang tegas dari pusat tersebut mengakibatkan perpecahan yang semakin meluas di tingkat daerah,

dimana kemudian terbentuk beberapa kubu yang pro dan kontra terhadap pihak yang berseteru atau bermasalah, dalam hal pemilu 2009, tentu saja pihak-pihak yang berseteru tersebut adalah kader-kader yang memperebutkan surat rekomendasi dari partai Demokrat untuk dapat maju dalam pemilu 2009 walikota Surabaya tahun 2010, yaitu Wisnu Wardhana, Arif Afandi dan Fandi Utomo.

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dalam pokok bahasan Dinamika Partai Politik, studi kasus konflik di Partai Demokrat pada masa Pemilu 2009 Surabaya Tahun 2010, sehingga dari rumusan masalah maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat konflik internal yang terjadi sebelum pemilu 2009 terkait dengan kandidat, dimana karena turunnya surat rekomendasi dari pusat terlalu mepet dengan pelaksanaan Pemilu, sehingga konsolidasi internal dalam upaya menguatkan dukungan sulit dilakukan. Selain itu Fandi Utomo, kader partai Demokrat yang tidak mendapat surat rekomendasi dari partai untuk maju dalam ajang pemilu 2009, memilih untuk tetap mencalonkan diri walaupun melalui dukungan dari partai politik lain. Kemudian konflik yang terjadi ternyata tidak ditanggulangi dan tidak ada konsolidasi kelembagaan partai yang terjadi pasca pemilu 2009 sehingga melanggengkan keberadaan konflik tersebut.
2. Bentuk-bentuk konflik yang terjadi adalah, Konflik dalam diri individu, yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Konflik antar individu, dalam organisasi yang sama, dimana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan (seperti antara manajer dan bawahan). Konflik antara individu dalam kelompok, yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok.

²⁰ Ibid. h.28-29.

²¹ Handoko, T. Hani. Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 1999. h. 349.

Konflik antar organisasi, yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu Negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien.²¹

3. Usaha untuk menyelesaikan konflik tidak terjadi, dimana pasca pemilukada Partai Demokrat tetap mendingkan konflik yang terjadi, walaupun telah diketahui bahwa konflik tersebut masih terjadi dan tidak hilang begitu saja seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun diam juga adalah suatu tindakan, namun mendingkan suatu konflik juga akan berpotensi untuk menimbulkan perilaku menyimpang pada komponen organisasi partai politik di dalamnya.

Dari uraian di atas, maka dalam skripsi ini dapat diformulasikan saran sebagai berikut. Secara kontekstual, terdapat metode-metode pengelolaan konflik yang dapat dipakai sebuah partai politik untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi Partai tersebut, mengingat konflik tidak dapat dihilangkan begitu saja, maka konflik perlu dikelola dengan baik agar tidak berkembang menjadi anarkis. Metode-metode tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Metoda Stimulasi Konflik. Konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu kelompok. Situasi dimana konflik terlalu rendah akan menyebabkan para karyawan (dalam hal ini komponen organisasi parpol) takut berinisiatif dan menjadi pasif. Kejadian-kejadian, perilaku dan informasi yang dapat mengarahkan orang-orang bekerja lebih baik diabaikan; para anggota kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan kejelekan pelaksanaan kerja. Manajer dari kelompok seperti ini perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mempunyai efek penggemblengan.²² Metoda stimulasi konflik meliputi: Pemasukan atau penempatan orang luar kedalam kelompok; Penyusunan kembali organisasi; Penawaran bonus, pembayaran insentif dan penghargaan untuk mendorong persaingan; Pemilihan manajer-manajer (pimpinan organisasi) yang tepat; Perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan.²³

2. Metoda Pengurangan Konflik. Manajer (dalam hal ini pimpinan organisasi) biasanya lebih terlibat dengan pengurangan konflik daripada stimulasi konflik. Metoda pengurangan konflik

menekan terjadinya antogisme yang ditimbulkan oleh konflik. Jadi, metoda ini mengelola tingkat konflik melalui "pendinginan suasana" tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula ditimbulkan konflik. Dua metoda dapat digunakan untuk mengurangi konflik. Pendekatan efektif pertama adalah mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok. Metoda efektif kedua adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan untuk menghadapi "ancaman" atau "musuh" yang sama.

3. Metoda Penyelesaian Konflik. Metoda penyelesaian konflik yang akan dibahas berikut berkenaan dengan kegiatan-kegiatan para manajer atau pimpinan organisasi yang dapat secara langsung mempengaruhi pihak-pihak yang bertentangan. Ada tiga metoda penyelesaian konflik yang sering digunakan, yaitu dominasi atau penekanan, kompromi, dan pemecahan masalah integratif. Metoda-metoda ini berbeda dalam hal efektifitas dan kreatifitas penyelesaian konflik serta pencegahan situasi konflik di masa mendatang.

- a. Dominasi dan penekanan. Dominasi dan penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (1) kekerasan (*forcing*), yang bersifat penekanan otokratik. (2) Penenangan (*smoothing*), merupakan cara yang lebih diplomatis. (3) penghindaran (*avoidance*), dimana pimpinan menghindar untuk mengambil posisi yang lebih tegas. (4) Aturan mayoritas, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara (*voting*) melalui proses yang adil.

- b. Kompromi. Melalui kompromi, manajer mencoba menyelesaikan konflik melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bentuk-bentuk kompromi meliputi pemisahan, arbitrase, kembali ke peraturan yang berlaku dan penyuapan (*bribing*).

- c. Pemecahan masalah integratif. Dengan metoda ini konflik antar kelompok dirubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Secara bersama, pihak-pihak yang bertentangan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang timbul diantara mereka. Di samping penekanan konflik atau pencarian kompromi, pihak-pihak secara

²² Handoko, T. Hani. Manajemen, Yogyakarta: BPFE, 1999. h.351

²³ Ibid, h.351

terbuka mencoba menemukan penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Dalam hal ini peran pimpinan diperlukan untuk mendorong bawahannya bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Setelah berlangsungnya sebuah Pemilu, hendaknya setiap Partai Politik dapat merefresh ulang anggotanya. Seperti diketahui, pemilu selalu sarat dengan adanya ketegangan-ketegangan karena perbedaan pasti terjadi, baik dalam persoalan kandidat maupun mekanisme atau strategi kampanye yang dilakukan. Sehingga ketegangan-ketegangan tersebut perlu dinetralisir dengan cara diadakan pertemuan semua anggota Partai dan kader-kader yang sebelumnya berkontestasi pra Pemilu. Misalnya, dalam Partai Demokrat, mempertemukan Arif Affandi, Fandi Utomo dan Wisnu Wardhana dalam rangka membahas konsolidasi Partai. Kemudian mereka juga dipertemukan dengan semua anggota partai dalam suatu even khusus yang menunjukkan bahwa kader-kader mereka masih berada dalam satu rel politik yaitu Partai Demokrat dan kader-kader tersebut mengajak seluruh elemen Partai untuk bergandengan tangan dan mengokohkan konsolidasi Partai, sehingga mesin politik Partai tersebut dapat berjalan dengan lebih baik lagi untuk ke depannya.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Suroto. Rudianto, Dody. *Partai-Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Mandala Pratama, 2003.

Handoko, M.B.A. Dr. T. Hani. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.

Dr. Wahyudi. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Daftar Pustaka

Amal, Ichasanul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1988.

Faizal, Akbar. *Partai Demokrat & SBY : Mencari Jawab Sebuah Masa Depan*. PT. Framedia Pustaka Utama, 2005. Halaman vii

Huntington, Samuel, P. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 2005.

Irtanto. *Dinamika Politik Lokal: Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Marijan, Kacung. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.